

BAB II

ISLAM DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Kebijakan politik luar negeri suatu negara biasanya mencerminkan kemauan politik negara bersangkutan dalam berhubungan dengan negara-negara lain, kemauan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik domestiknya, sebagian besar orang mengenal Islam hanya sebagai agama, dan juga mengartikannya sebagai kegiatan yang identik dengan upacara ritual dan sifatnya lebih menyangkut hubungan individu dengan Tuhannya. banyak yang berpendapat bahwa negara tidak perlu mengurus dan ikut campur adukan antara agama dan juga pemerintahan,²⁶ pendapat ini tentunya di dasarkan pada sejarah trauma yang di alami oleh kaum kristiani yang telah di monopoli oleh pihak gereja sehingga memisahkan antara agama dan negara, berikut ini akan di paparkan pertautan antara islam dan politik yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lain bahkan dalam segala aspek kehidupan manusia agama islam mengaturnya dengan terperinci hal ini dapat di buktikan dari sejarah peradaban yang di bangun Nabi Muhammad saw.

A. Islam dan Politik

Kedua variabel di atas banyak di perbincangkan oleh para intelektual muslim maupun para intelektual non-muslim maka untuk dapat menguraikan kedua variabel di atas secara objektif maka alangkah baiknya kita berangkat dari akar pembahasan tersebut agar dapat memahami

²⁶ <http://politik.kompasiana.com/2011/01/16/islam-dan-politik-luar-negeri-indonesia-335062.html> (di akses : Sabtu, 04-01-2014)

secara komprehensif, secara terminology perkataan politik berasal dari bahasa latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, artinya (sesuatu yang) berhubungan dengan warga negara atau warga kota. kedua kata itu berasal dari kata *polis* maknanya kota. dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1989), pengertian politik sebagai kata benda ada tiga. jika dikaitkan dengan ilmu artinya (1) pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); (2) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain; dan (3) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).

Karena maknanya yang banyak itu, dalam kepustakaan ilmu politik bermacam-macam definisi tentang politik. keaneka macaman definisi itu, disebabkan karena setiap sarjana ilmu politik hanya melihat satu aspek atau satu unsur politik saja. menurut Miriam Budiardjo (1993:8,9) ada lima unsur sebagai konsep pokok dalam politik, yaitu (1) negara, (2) kekuasaan, (3) pengambilan keputusan, (4) kebijaksanaan (kebijakan), dan (5) pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Kelima unsur politik yang dikemukakannya itu berdasarkan definisi politik yang dirumuskannya. Ia menyatakan bahwa "politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu." untuk melaksanakan tujuan-tujuan sistem politik itulah diperlukan kelima unsur di atas. dan, dari definisi yang dikemukakannya, Miriam Budiardjo melihat kegiatan (politik) merupakan inti definisi politik.

Rumusan yang berbeda dikemukakan oleh Deliar Noer. Dengan mempergunakan dua pendekatan yakni (1) pendekatan nilai dan (2) pendekatan perilaku, Deliar mengatakan bahwa "politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam

bentuk atau susunan masyarakat." Dari rumusan ini kelihatan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia baik berupa aktivitas maupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan mempergunakan kekuasaan (Abd. Muin Salim, 1994 : 37)

Sedangkan politik di dalam islam jika di lihat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. oleh sebab itu, di dalam beberapa sumber para ulama menyebutnya dengan istilah *siyasah syar'iyah*. dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* bererti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). bila dikatakan *sasa al amra* artinya *dabbarahu* (mengurusi / mengatur perkara). di dalam Islam, kekuasaan politik kait mengait dengan al- hukm. perkataan al-hukm dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan 210 kali dalam Al-Qur'an.

Dalam bahasa Indonesia, perkataan al-hukm yang telah dialih-bahasakan menjadi hukum intinya adalah peraturan, undang-undang, patokan atau kaidah, dan keputusan atau vonis (pengadilan), di dalam bahasa Arab, kata tersebut yang berpola masdar (kata benda yang diturunkan dari kata kerja) dapat dipergunakan dalam arti perbuatan atau sifat. Dengan demikian, sebagai perbuatan hukum bermakna membuat atau menjalankan keputusan dan sebagai kata sifat kata itu merujuk pada sesuatu yang diputuskan yakni keputusan atau peraturan perundang-undangan

Seperti dikenal dalam bahasa Indonesia mengenai (sebagian) arti perkataan hukum. kalau makna perbuatan itu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, arti perbuatan dalam hubungan ini adalah kebijaksanaan (kebijakan) atau pelaksanaan perbuatan sebagai upaya pengaturan masyarakat. Di sini jelas kelihatan hubungan al- hukm dengan konsep atau unsur politik yang

telah dikemukakan di atas, dan kaitan kata itu dengan kekuasaan politik. Wujud kekuasaan politik menurut agama dan ajaran Islam adalah sebuah sistem politik yang diselenggarakan berdasarkan dan menurut hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an (Abd. Muin Salim, 1994:161,293).

Jika kata hukm yang berasal dari kata kerja hakama yang terdapat dalam surat Al-Qalam (68): 36,39 dan 48 dan kata hukm dalam surat Al-Maidah (5): 50 dan 95 diperhatikan dengan seksama, jelas bahwa arti kata hukm dalam ayat-ayat itu tidak hanya bersandar pada Tuhan, tetapi juga pada manusia. Ini berarti bahwa menurut agama dan ajaran Islam ada dua hukum. pertama adalah hukum (yang ditetapkan) Tuhan dan kedua adalah hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan di atas.²⁷

Sehingga jelas bahwa sistem yang di bangun oleh Rasulullah saw, dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah jika di lihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak di sangsikan lagi dapat di katakan bahwa system itu adalah system politik *par excellence*, dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk di katakan bahwa system itu adalah system religious, jika di lihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat system itu berpijak, bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan, sedangkan kedua hal itu sendiri, menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid, saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain.²⁸

²⁷ <http://ocw.gunadarma.ac.id/course/letters/study-program-of-english-literature-s1/pendidikan-agama-islam/agama-islam-dan-politik> (diakses :Minggu, 05-01-2014)

²⁸ <http://www.gunadarma.ac.id/pendidikan-agama-islam/agama-islam-dan-politik>

Berikut akan di perlihatkan beberapa pendapat dari para orientalis barat yang dengan tegas dan jelas menjelaskan relasi antara islam dan politik, karena jika di kemukakan oleh para ulama muslim maupun filosof muslim mungkin dapat menyangka cenderung subjektif sehingga di campakan oleh karena itu para orientalis di bawah ini dapat meruntuhkan stigma-stigma yang memisahkan antara islam dan politik di antaranya adalah :

1. Dr. V. Fitzgerald berkata : "Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekad-dekad terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mendakwa diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahawa kedua sisi itu saling bergandingan dengan selaras, yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain".
2. Prof. C. A. Nallino berkata : "Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan: agama (*a religion*) dan negara (*a state*). Dan batas-batas wilayah negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya".
3. Dr. Schacht berkata : " Islam lebih dari sekadar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan".
4. Prof. R. Strothmann berkata : "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Kerana pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politik yang bijaksana, atau "negarawan".
5. Prof D.B. Macdonald berkata : "Di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama dalam undang-undang Islam"

6. Sir. T. Arnold berkata : " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang ketua agama dan ketua negara".
7. Prof. Gibb berkata : "Dengan demikian, jelaslah bahawa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang bebas. Ia mempunyai cara tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundangan dan institusi"²⁹

Seluruh pendapat para orientalis pada pembahasan di atas di perkuat oleh fakta-fakta sejarah, di antara fakta sejarah yang tidak dapat di ingkari oleh siapa pun adalah setelah timbulnya dakwah islam, kemudian berbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan system yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang di namakan sebagai bangunan masyarakat politik atau yang di namakan sebagai negara.

B. Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia

Untuk dapat memahami islam dan kebijakan luar negeri Indonesia secara komprehensif maka terlebih dahulu kita harus memahami dengan baik konsep dari kedua variabel tersebut, politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara pada dasarnya merupakan suatu komitmen berupa strategi dasar dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. politik luar negeri juga

²⁹ http://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam (diakses : Minggu, 05-01-2014)

menjadi cerminan dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan pemerintahnya di luar negeri. baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri serta sekaligus sebagai upaya dalam menentukan keterlibatan suatu negara di dalam konstelasi politik internasional maupun isu-isu internasional dan lingkungannya.³⁰

Kebijakan luar negeri Indonesia sangat kuat hubungannya dengan islam hal ini berdasarkan fakta bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara adalah perpanjangan tangan dari kepentingan dalam negeri, kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional adalah kemauan masyarakat mayoritas dan elite politik yang memiliki ideology sama di mana menempati wilayah tersebut, maka ideology masyarakat dan elite politik tersebut sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sebuah Negara baik dalam negeri maupun dalam konstelasi politik internasional, islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dengan jumlah terbesar di dunia yang di anut oleh elit politik maupun masyarakat Indonesia telah melegitimasi agama pada konteks tertentu sebagai kebijakan Negara dalam politik luar negerinya

Walaupun secara historis Indonesia telah mencetuskan politik luar negeri yang bebas dan aktif namun tidak dapat di pungkiri bahwa politik luar negeri Indonesia sangat mempertimbangkan islam sebagai kekuatan nasional alhasil Indonesia dalam perodesasi kepemimpinan baik Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY, islam menjadi pertimbangan yang tidak bias di kesampingkan jika di kesampingkan maka tentunya stabilitas politik dalam negeri mengalami *instabilitas*, dalam memelihara dan menjaga kepentingan rakyatnya, walaupun pada akhirnya kebijakan luar negeri Indonesia berseberangan dengan aspirasi umat islam di Indonesia maka pemerintah tidak tinggal diam dalam meredakan kemauan

³⁰ N. S. (2014). *Islam, Teori dan Perannya dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia*. <http://repository.uahes.ac.id/> (di

umat islam Indonesia dengan mengambil langkah-langkah konkrit dalam upaya mengartikulasikan kepentingan umat islam di Indonesia pada konstelasi internasional.

Setiap negara yang merdeka memiliki kebijakan luar negeri yang wajib di laksanakan untuk menciptakan perdamaian dunia namun seringkali kemandirian sebuah negara dalam melakukan kebijakan luar negerinya di pengaruhi oleh negara-negara lain yang memiliki kepentingan atas negaranya, hal ini di karenakan system maupun ideology dan karakter dari bangsa dan Negara tersebut sangat lemah dan rapuh sehingga mudah di goncang dan di setir oleh Negara-negara lain berbeda dengan Indonesia yang di bentuk oleh para *the founding fathers* yang memiliki karakter yang kuat dan integritas kebangsaan yang mumpuni dalam membangun sebuah tata masyarakat keindonesiaan yang multicultural dan tetap dalam kerangka bhineka tunggal ika.

Perkembangan mutakhir politik Indonesia menunjukkan bahwa agama merupakan satu institusi politik yang paling penting dalam sistem Pancasila. sebab, dari agamalah para politisi coba memusatkan atau mencari legitimasi mereka, baik secara langsung ataupun tidak. Agama dipergunakan sebagai sumber-sumber ketajaman-ketajaman moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat, yang merupakan basis masyarakat Indonesia.³¹ dewasa ini semakin terasa bahwa Islam menjadi faktor determinan dalam pengambilan kebijakan politik baik dalam maupun luar negeri Indonesia. Dalam lingkup internal, Islam dimaknai sebagai suatu kelompok atau komunitas dan kesatuan sosiologis masyarakat Indonesia yang mendukung pencapaian tujuan nasional, yaitu terwujudnya kesatuan republik Indonesia. Adapun dalam konteks internasional, Islam dimaknai sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam hubungannya dengan negara lain

³¹ Wahyuningrum, Hapsari Dian; Lumumba, Patrice; Syahdan, Pusparida : *Pengaruh islam terhadap perumusan kebijakan politik luar negeri indonesia*. <http://repository.unhas.ac.id>. (di akses : Senin,05-01-2014) .Nurcholish Madjid, dalam Muhammad Hari Zamharir, 2004, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hal. ix

serta yang terkait dengan isu-isu global seputar Islam.³² Hal ini dapat di lihat dalam beberapa kasus seperti halnya pada Juni 2012, konflik etnis terjadi di bagian barat negara bagian Rakhine, Myanmar, antara etnis Arakan yang mayoritas beragama Budha dengan Etnis Rohingnya yang mayoritas beragama islam,dalam kasus tersebut di anggap sebagai upaya pembantaian Etnis Muslim Rohingnya yang di lakukan oleh etnis Arakan dan pemerintah Myanmar, yang berujung pada meningkatnya arus pengungsi Rohingnya keluar Myanmar untuk mencari perlindungan ke Bangladesh dan beberapa negara di Asia Tenggara³³

Indonesia pada saat itu dalam posisi yang dilematis di satu sisi indonesia adalah salah satu anggota ASEAN (*Association of SouthEast Asian Nations*) yang merupakan organisasi regional yang menggunakan prinsip *non-interference* sesuai yang tertera pada piagam ASEAN bahwa tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN namun karena pergolakan dalam negeri baik reaksi maupun kecaman dan desakan masyarakat indonesia yang mayoritas muslim maka pada kasus muslim Rohingnya di Myanmar yang mengalami diskriminasi atas pemerintah Myanmar, Indonesia cenderung mengesampingkan bahkan sangat agresif untuk mendorong pemerintah Myanmar segera menyelesaikan konflik di Rakhine dan memberikan kebebasan dan hak untuk etnis muslim Rohingnya agar dapat menempati wilayahnya, hal ini terlihat dalam upaya Bilateral, Regional dan Multilateral yang di perjuangkan indonesia.

Selain itu konflik yang menimpa Muslim Moro di Filipina merupakan konflik yang telah membuat stabilitas kawasan ASEAN menjadi empati untuk segera menyelesaikan konflik

³² *ibid*, hal.7

³³ Lihat dalam, misalnya, "Warga Malaysia dan Rohingnya kepung kedubes Myanmar," OKEZONE.com, 6 Agustus 2012, (di akses pada : 31 Oktober 2013) lihat juga dalam, "Ratusan pengungsi Rohingnya Menyebar di Indonesia,"

tersebut, penyebab utama konflik Mindanao adalah perkara sentimen – sentimen primordialis. Kebijakan represif Marcos bagi komunitas Islam di Mindanao seringkali di pahami sebagai representasi kekuatan politik Katolik yang secara sengaja hendak memarginalkan Islam, dalam dinamika hubungan dengan pemerintah salah satu gerakan yang cukup signifikan dalam mengartikulasikan kepentingan komunitas Muslim Moro adalah MNLF, sebuah gerakan perlawanan yang di pimpin oleh Prof. Nur Misuari sebagai respon terhadap upaya pemarginalan terhadap bangsa Muslim Moro baik oleh etnik Ilaga ataupun pemerintah Filipina.

MNLF cenderung melakukan politik yang dinamis di bandingkan dengan organisasi perlawanan yang lain, MNLF sebelumnya menyerukan upaya pemisahan diri masyarakat Mindanao dari pemerintah Filipina, namun kemudian menurunkan tuntutan pembentukan negara Mindanao merdeka menjadi pemerintahan otonom Muslim Mindanao (Autonomous Region for Mindanao Muslim / ARMM) di dekade 1990an. Namun seiring dengan semakin terjepitnya legitimasi MNLF dalam ARMM pada tahun 2001, Nur Misuari kembali menyerukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina yang kemudian berakibat penangkapannya.³⁴

Eskalasi konflik yang terjadi di Filipina antara Muslim Moro dan pemerintah Filipina telah mengalami proses penyelesaian yang begitu panjang hal tidak terlepas dari peran negara-negara Muslim yang ikut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Filipina hal ini bisa di lihat dalam keterlibatan dan protes dari pemerintah Libya, Malaysia, Arab Saudi OKI tanpa terkecuali Indonesia dalam upaya mempertanyakan kebijakan pemerintah Filipina atas komunitas Muslim Mindanao, Indonesia berperan aktif dalam upaya diplomatik memfasilitasi resolusi perdamaian terhadap konflik yang menina bangsa Moro.

³⁴ Supriyanto, Sidik Ahmedi, *Resolusi konflik di dunia Islam*, 2011, Yogyakarta : Gema ilmu

Indonesia berhasil menjadi mediator dan memfasilitasi proses perdamaian bagi konflik Muslim Moro, peran Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia dalam memfasilitasi proses perdamaian bagi Muslim Moro cukup besar dan Vital, partisipasi Indonesia dalam proses perdamaian itu di resmikan saat ICFM ke – 20 di Istanbul pada tahun 1991 meminta di perluasnya Quadripartite Committe menjadi Ministerial Committe of Six. Pertemuan para menteri OKI di Karachi pada tanggal 25 – 29 April 1993 secara tidak langsung memberikan dukungan kepada indonesia untuk menjadi ketua Committe of Six hal ini di sebabkan karena indonesia merupakan negara islam terbesar di dunia dan memegang peran penting di kawasan, Committe of Six ini di beri mandat dengan tugas untuk menyelesaikan kasus Moro untuk selama – lamanya dengan melakukan negosiasi komprehensif melalui cara perdamaian berdasarkan perjanjian Tripoli.³⁵

Dalam kasus yang menimpa bangsa Moro di Filipina dan peran indonesia dalam menyelesaikan konflik yang menina Muslim Moro di Filipina tidak bisa di pahami sebagai upaya pencitraan rezim yang berkuasa dan hanya faktor ikatan dalam ASEAN maupun faktor tuntutan regulasi yang berlaku namun lebih dari pada harus di lihat bagaimana kebijakan untuk Muslim Moro di bangun sesungguhnya telah terkonstruksi oleh dunia internasional bahwa indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan dorongan oleh berbagai macam raksasa organisasi islam di indonesia.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa politik luar negeri tak lain sebagai refleksi dari keinginan seluruh masyarakatnya yang harus diperjuangkan oleh pemerintah di luar negeri. Maka, tak dapat dipungkiri bahwa faktor Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, menjadi salah satu faktor domestik yang mempengaruhi pemerintah khususnya dalam partisipasi

³⁵ Anak Agung Banyu Perwita. 2007. Politik luar negeri Indonesia dan dunia islam. Bandung : UNPAR Press

dan pengambilan kebijakan luar negeri. Ditambah lagi, dengan semakin terbukanya penerimaan masyarakat terhadap partai-partai politik yang berideologikan Islam untuk mengambil peran dalam pemerintahan.³⁶

Melalui komunitas dan organisasi Islam nasional yang ada di Indonesia, peran dan partisipasi umat Islam dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah berjalan secara lebih terorganisir. Umumnya, lembaga-lembaga Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, NU dan ICMI diasumsikan sebagai lembaga yang mewakili aspirasi umat Islam Indonesia secara keseluruhan. pandangan dan legitimasi dari lembaga tersebut mempengaruhi dan seringkali menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan politis termasuk hal yang berkaitan dengan agenda politik luar negeri Indonesia khususnya yang menyangkut isu seputar Islam dan dunia Islam.³⁷

Dari pemaparan di atas dapat kita melihat bahwa Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia khususnya terkait isu-isu seputar Islam dan dunia Islam memiliki ikatan yang cukup kuat walaupun Indonesia bukanlah Negara Islam namun pemerintah Indonesia tidak terlepas dari rujukan mayoritas umat Islam dan ormas-ormas Islam maupun institusi yang menampung aspirasi umat Islam

C. Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah

Pada dasarnya Indonesia dan Negara-negara muslim yang berada di timur tengah memiliki ikatan persaudaraan yang kuat dalam bingkai keislaman, namun hal ini tidak menjadi dasar sepenuhnya keberpihakan Indonesia pada Negara-negara muslim di timur tengah karena

³⁶ ibid. hal 8

³⁷ ibid. hal 9

jika di lihat dari periodisasi kepemimpinan di Indonesia maka kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan timur tengah mengalami pasang surut dan dinamika yang cukup signifikan, hal ini dapat di lihat dari masa kepemimpinan Indonesia mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus dur, Megawati dan SBY yang kadang terlihat kebijakannya cenderung ke kanan bahkan terkadang kebijakannya cenderung ke kiri seiring dengan dinamika tersebut factor kekuatan domestic sangat mempengaruhi kebijakan tersebut hal ini tidak terlepas dari pengaruh islam yang ikut andil dalam mengartikulasikan kepentingannya terkait dengan isu-isu dunia islam yang kemudian terlihat begitu jelas persaudaraan keislamannya dalam hal ini kawasan timur tengah yang menjadi kawasan kelahiran agama islam di dunia.

Timur Tengah memiliki posisi yang sangat strategis. Timur Tengah, selama berabad-abad telah diakui sebagai salah satu kawasan yang secara geografis paling strategis di dunia. hal itu disebabkan karena Timur Tengah terletak di antara 3 benua, yaitu Eropa- Asia – Afrika³⁸ sehingga kawasan timur tengah tidak bisa di pungkiri menjadi jalur bagi perdagangan internasional dalam hal ini yang sangat di minati adalah minyak yang menjadi energi untuk kelangsungan hidup manusia.

Tidak hanya itu Timur Tengah juga merupakan kawasan di mana lahirnya tiga agama prioritas di dunia sehingga konstelasi politik internasional banyak menyita perhatian masyarakat internasional dalam melihat posisi negara – negara yang berusaha mengambil pengaruh di kawasan ini.

Gambar di bawah ini memperlihatkan Timur Tengah Sebagai Penghubung Eropa-Asia-Afrika



Selain menjadi kawasan yang sangat strategis atau sebagai jalur perdagangan internasional kawasan timur tengah juga merupakan kawasan yang sangat subur penghasil sumber daya alamnya dalam hal ini minyak yang menjadi energi utama bagi pengembangan industrialisasi saat ini, hal inilah yang menjadikan kawasan timur tengah sangat di minati oleh berbagai negara khususnya negara-negara industri yang sangat tergantung pada energi minyak, di sisi yang lain kawasan timur tengah juga merupakan kawasan yang sangat rawan konflik hal ini dapat di lihat dari keanekaragaman yang di miliki kawasan tersebut, jika tidak di kelola dengan baik maka konflik dapat terjadi dengan mudah, baik konflik perebutan wilayah, konflik antara etnis, aliran, dan sumber-sumber konflik yang berorientasi pada ekonomi hal inilah menjadikan kawasan timur tengah banyak di sorot oleh dunia internasional tanpa terkecuali indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia

Jika di lihat dari masa kepemimpinan Indonesia mulai dari presiden Soekarno hingga presiden SBY hubungan antara Indonesia dan Negara-negara di timur tengah terbilang baik dan harmonis lebih khususnya Negara-negara muslim yang berada di kawasan tersebut, hal ini

berdasarkan dinamika kerjasama yang di lakukan oleh Negara-negara muslim yang berada di

kawasan timur tengah dengan Indonesia maupun peran Indonesia terhadap berbagai macam konflik yang terjadi di timur tengah, salah satu contoh kasus yang sangat kongkrit adalah konflik yang melibatkan antara Israel dan Palestina, konflik yang telah memakan banyak korban dan cukup panjang rentang waktu penyelesaian konflik tersebut membuat Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim terbesar di dunia mengambil peran yang signifikan.

Salah satu konflik di timur tengah yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia adalah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, selama pemerintahan Soekarno dan Soeharto, sikap resmi pemerintah Indonesia adalah mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, sekaligus tidak menjalin hubungan diplomatic dengan Israel selama Palestina belum merdeka, sedangkan pada periode Abdurahman Wahid independensi politik luar negeri Indonesia terlihat cukup kuat ketika Gus Dur berani memutar haluan menjauh dari barat dengan mewacanakan membentuk poros Jakarta - Beijing - New Delhi, serta ingin lebih memperkuat hubungan kerjasama dengan Negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah.³⁹

Sewaktu Gus Dur menjabat sebagai ketua PB NU, kemudian menyarankan agar Indonesia segera membuka hubungan diplomatic dengan Israel menurutnya dengan adanya hubungan tersebut Indonesia justru akan memiliki peran yang signifikan dalam membantu perjuangan rakyat Palestina, Salah satu usulan Gus Dur untuk memecah kebuntuan proses perdamaian antara kedua Negara tersebut yakni dengan pembagian kekuasaan di wilayah⁴⁰ Yerusalem, menurut Gus Dur, kekuasaan administrative di wilayah ini seharusnya di pegang oleh Israel, sedangkan kekuasaan politik di jalankan oleh sebuah komite dari tujuh Negara yakni, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, Israel, dan PBB.

Kebijakan Gus Dur yang lain dalam isu konflik Israel- Palestina adalah indonesia ikut mendukung resolusi yang di hasilkan sidang khusus komisi HAM PBB di Jenewa 19 oktober 2000, indonesia bersama 19 negara lainnya dari total 53 negara yang hadir menyetujui resolusi yang menghasilkan beberapa point penting antara lain : (a) segera membentuk komisi penyidik HAM untuk mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional oleh israel di wilayah pendudukan Palestina, serta melaporkan kesimpulan dan temuan-temuannya kepada komisi HAM PBB. (b) meminta komisaris tinggi PBB untuk HAM segera melakukan kunjungan ke wilayah Palestina yang di duduki, guna menghimpun pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Palestina oleh israel.

Ada tiga kebijakan yang cukup menonjol pada periode Gus Dur terhadap konflik israel-Palestina, pertama keinginan untuk membuka hubungan dagang dengan israel sebagai upaya menolong ekonomi indonesia, kedua keinginan agar indonesia bisa menjadi juru damai dalam konflik tersebut, ketiga indonesia turut menyetujui resolusi sidang khusus komisi HAM PBB di Jenewa tahun 2000 untuk membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Sedangkan pada periode Megawati konflik yang terjadi antara Palestina dan israel semakin memprihatinkan dengan skala korban yang cukup besar misalnya sepanjang akhir tahun 2001, kontak senjata yang di ikuti oleh aksi bom bunuh diri antara pasukan kedua negara terjadi di berbagai tempat.

Pada tanggal 3 desember 2001, militer israel masuk dan menduduki sebagian kota-kota yang selama ini menjadi wilayah otonomi Palestina, seperti Nablus, Ramallah, serta Beituna di tepi barat, hal ini semakin menimbulkan simpati dari berbagai negara tanpa terkecuali indonesia sebagai negara dengan papulasi muslim terbesar di dunia, maraknya aksi unjuk rasa dari masyarakat atas agresi israel tersebut, membuat pemerintah ikut mengambil sikap, pemerintah

indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa indonesia mengutuk keras agresi militer israel di Ramallah (Palestina) maret 2002 tersebut, agresi militer tersebut di nilai selain merenggut nyawa masyarakat sipil, juga mengancam keselamatan presiden Palestina Yasser Arafat dan masa depan perdamaian, karena itu indonesia meminta agar israel bertanggung jawab penuh atas keselamatan presiden Yasser Arafat.⁴¹

Pernyataan resmi indonesia kemudian di sampaikan Menko, Polkam yang waktu itu di jabat oleh Soesilo Bambang Yodhyono, yang isinya sebagai berikut : (1) mengutuk keras agresi militer israel terhadap Palestina di Ramallah yang mengancam keselamatan Yasser Arafat (2) Israel harus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan keamanan diri Yasser Arafat serta terhadap proses perdamaian di wilayah timur tengah (3) Menekankan pandangan indonesia mengenai peranan inti Yasser Arafat dalam proses perdamaian di timur tengah dan penolakan terhadap upaya israel dalam mengesampingkan peranan itu (4) Menekankan terciptanya perdamaian yang adil dan menyeluruh di timur tengah dan menuntut pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB No 242, 338 dan resolusi – resolusi lain yang relevan dan prinsip *land for peace* guna mengakhiri pendudukan israel yang tidak sah terhadap wilayah arab.

Point yang ke lima adalah pada masa sulit perjuangan rakyat Palestina ini, pemerintah dan rakyat indonesia tetap menjunjung tinggi rasa solidaritas dengan rakyat Palestina dalam perjuangan mereka mendirikan negara Palestina di tanah airnya⁴² selain itu, pemerintah indonesia juga menghimbau bahwa perlu adanya upaya internasional yang terpadu dan konkret untuk segera menghentikan agresi militer di tepi barat tersebut, khususnya di Ramallah dan agresi berkelanjutan terhadap warga sipil Palestina, termasuk wanita dan anak – anak,

⁴¹ Muhammad Faris Alfadh. 2012. *Persepsi gerakan mahasiswa islam terhadap politik luar negeri Indonesia*.

pemerintah mengharapkan peranan yang lebih aktif dari dewan keamanan PBB, sesuai dengan tanggung jawabnya.

Politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel – Palestina pada periode Megawati, bisa di bilang lebih banyak dilakukan melalui seruan-seruan moral, memang upaya tersebut sedikit tidak mampu meredam banyaknya aksi masa yang terjadi di dalam negeri, namun demikian seruan moral tersebut nampaknya masih jauh dari harapan masyarakat, terutama jika melihat korban jiwa yang sangat banyak dari pihak Palestina serta ancaman yang dialami oleh Presiden Palestina Yasser Arafat sedangkan pada periode selanjutnya kebijakan pemerintahan Yudhoyono baru terlihat aktif pasca meluasnya konflik Israel – Palestina hingga ke Libanon pada bulan Mei 2006.

Dampak konflik yang cukup memprihatinkan membuat pemerintah bereaksi dengan cepat, tidak lama setelah penyerbuan Israel, pemerintah Indonesia mengambil langkah struktural dengan melayangkan surat kepada sekjen PBB Kofi Anan (waktu itu) yang isinya meminta PBB mengambil langkah strategis dan efektif bagi penyelesaian gejolak Israel – Libanon, pemerintah Indonesia juga mengusulkan adanya *military peacekeeping operation* karena konflik Israel – Libanon melibatkan pertempuran senjata, maka keterlibatan pasukan tentara perdamaian menjadi tak terelakan, presiden SBY kemudian meminta TNI mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari *peace keeping operation force* di timur tengah apabila diminta oleh PBB

Indonesia juga mengusulkan lima langkah untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang sekaligus merupakan pandangan resmi dari pemerintah Indonesia, kelima langkah tersebut yakni : (a) Perlu segera dilakukan gencatan senjata dengan disponsori PBB (b) bila gencatan senjata berlaku, harus diawasi oleh pasukan pemelihara perdamaian yang juga di sponsori oleh PBB (c) bila gencatan senjata berlangsung, maka perlu di pastikan bantuan kemanusiaan bisa mengalir

dengan tepat (d) harus di pikirkan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik bersenjata tersebut dan (e) proses negosiasi harus di lanjutkan sehingga di capai solusi yang terbaik, bukan hanya bagi bangsa – bangsa di timur tengah tapi juga di dunia.

Pada kesempatan itu Yudhoyono juga menyampaikan bahwa indonesia akan berperan serta dalam pasukan pemelihara perdamaian dengan menyiapkan pasukan satu batalyon kebijakan ini kemudian di wujudkan dengan mengirimkan pasukan perdamaian indonesia dalam kontingan Garuda XXIII ke Lebanon pada akhir september 2006 untuk bergabung dengan UNIFIL, selain itu Yudhoyono juga memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebesar US\$ 1 juta kepada Palestina, dalam perjalananya politik luar negeri indonesia terhadap isu konflik israel – Palestina pada periode Yudhoyono bisa di bilang cukup aktif, periode Yudhoyono terlihat memainkan peranan yang cukup signifikan melalui diplomasi dan lobi – lobi internasional.⁴³

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa politik luar negeri Indonesia di kawasan timur tengah jika di lihat dari periodisasi kepemimpinan maka Indonesia tidak pernah absen dalam memainkan peranannya sebagai Negara yang mayoritas muslim khususnya pada isu –isu tertentu yang mendiskreditkan negara – negara muslim yang berada di timur tengah dalam hal ini kasus Palestina yang sangat banyak menelan korban jiwa dan sangat menjadi perhatian dunia internasional tanpa terkecuali indonesia, selain itu saat ini Indonesia juga cukup aktif dalam memainkan peranannya terkait isu kontemporer yang di alami negara- negara di kawasan timur tengah khususnya Negara-negara muslim terkait *Arab Spring* yang banyak menelan korban dan merusak berbagai macam infrastruktur, tak lupa Mesir dan Suriah menjadi prioritas utama

⁴³ *ibid* hal.138

Indonesia dalam penyelesaian konflik di Timur tengah yang saat ini masih berjalan proses

negosiasinya untuk mencapai kesepakatan damai dan penhentian aksi teroris